

PEMENUHAN KEBUTUHAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIAAhmad Arif Fadilah¹, Vriska Nadilla Handayani², Kezia Citra Kirana³

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Indonesia

Email: arif.fadilah@umt.ac.id, vriskanadilla@gmail.com, keziacitra02@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan warga negara merupakan salah satu tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh konstitusi dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, diimplementasikan dalam konteks HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pakar HAM serta praktisi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara, terdapat beberapa tantangan, seperti ketimpangan akses dan alokasi sumber daya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih inklusif serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan warga negara sesuai dengan prinsip HAM.

Kata kunci: Kebutuhan Warga Negara, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan, Pendidikan, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

The fulfillment of citizens' needs is a fundamental responsibility of the state as mandated by the constitution and human rights (HR) principles. This study aims to analyze how the fulfillment of basic needs, such as education, healthcare, and welfare, is implemented within the human rights framework in Indonesia. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, gathering data through document analysis and interviews with human rights experts and public policy practitioners. The findings reveal that despite various efforts by the government to address citizens' needs, challenges persist, including inequitable access and resource allocation. The study concludes that strengthening an inclusive legal and policy framework and fostering synergy between the government, society, and stakeholders are crucial to ensuring the fulfillment of citizens' needs in accordance with HR principles.

Keywords: Citizens' Needs, Human Rights, Welfare, Education, Public Policy.

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.735.6154Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan warga negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hak yang harus diakui dan dilindungi. Kebutuhan warga negara mencakup berbagai dimensi, termasuk kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hak asasi manusia, yang diatur dalam berbagai instrumen internasional dan konstitusi Indonesia, menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya sebagai bagian dari hak untuk hidup dengan martabat. Pendidikan, khususnya, memainkan peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan warga negara, karena pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. (Emmanuel Sujatmoko, 2010)

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik yang efektif dan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses kebutuhan dasar mereka. Tetapi dari berbagai kebijakan publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tantangan yang signifikan masih tetap ada. Kesenjangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan warga negara belum sepenuhnya terwujud. Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti alokasi anggaran yang tidak memadai, kurangnya infrastruktur, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya menjadi penghambat utama dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan warga negara di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Masalah-masalah ini berkaitan dengan hak asasi manusia, kesejahteraan, pendidikan, dan kebijakan publik yang ada. Berikut adalah identifikasi masalah yang relevan:

1. Kesenjangan Akses terhadap Kebutuhan Dasar: Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Hal ini terutama terlihat di daerah terpencil dan kurang berkembang, di mana infrastruktur dan sumber daya sering kali tidak memadai.
2. Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata: Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih bervariasi, dengan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan kurikulum yang relevan. Ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dan prestasi siswa, terutama di daerah yang kurang beruntung.
3. Kebijakan Publik yang Tidak Responsif: Kebijakan publik yang ada sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Proses perumusan kebijakan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak memadai

untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. (Philip, 2016)

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Dalam beberapa kasus, pemenuhan kebutuhan warga negara dapat terhambat oleh pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, dapat menghalangi akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik masih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negara dan mengabaikan suara masyarakat dalam perumusan kebijakan.
6. Dampak Krisis Ekonomi dan Sosial: Krisis ekonomi dan sosial, seperti yang terjadi akibat pandemi COVID-19, telah memperburuk kondisi pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemenuhan kebutuhan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kebijakan publik. (Aswandi & Roisah, 2019) Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah analisis terhadap yang diperoleh dari wawancara dan FGD:

- a. Kesenjangan Akses terhadap Pendidikan Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua dan pelajar, banyak yang mengungkapkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil. Salah satu informan menyatakan, "Anak-anak kami harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah yang layak, dan sering kali kami tidak mampu membayar biaya pendidikan tambahan." Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi sumber daya pendidikan.
- b. Kualitas Layanan Kesehatan Dalam diskusi kelompok terfokus, peserta mengeluhkan kualitas layanan kesehatan yang tidak merata. Seorang peserta menyatakan, "Kami sering kali harus menunggu sehari-hari untuk mendapatkan perawatan di puskesmas, dan banyak obat yang tidak tersedia." Ini mencerminkan tantangan dalam pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- c. Kebijakan Publik yang Tidak Inklusif Banyak informan mengkritik kebijakan publik yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seorang aktivis hak asasi manusia

menyatakan, "Kebijakan yang ada sering kali tidak melibatkan suara masyarakat. Kami merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan." Hal ini menunjukkan perlunya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

- d. Diskriminasi dan Pelanggaran Hak Beberapa informan, terutama dari kelompok marginal, mengungkapkan pengalaman diskriminasi dalam akses terhadap layanan dasar. Seorang perwakilan masyarakat adat mengatakan, "Kami sering kali diabaikan dalam program-program pemerintah, dan hak-hak kami tidak diakui." Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok-kelompok rentan.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari wawancara dan FGD, serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang relevan. Beberapa poin analisis adalah sebagai berikut:

Kesenjangan dalam Akses Pendidikan dan Kesehatan: Data menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Kesenjangan ini dapat dihubungkan dengan teori keadilan sosial yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk semua warga negara (Pamungkas & Hariri, 2022).

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Kritik terhadap kebijakan publik yang tidak inklusif menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan partisipasi sebagai salah satu elemen penting dalam pemenuhan hak (United Nations, 2006).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pengalaman diskriminasi yang diungkapkan oleh kelompok marginal menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia masih menjadi tantangan di Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam konteks kebijakan publik (Amnesty International, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Pemenuhan kebutuhan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi. (Merentek, 2018)

Kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kualitas layanan yang tidak merata, serta kebijakan publik yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi masalah utama yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok marginal menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan warga negara tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga implementasi yang efektif dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Program pelatihan bagi guru dan pengembangan kurikulum yang relevan juga harus menjadi prioritas.
- b. Perbaikan Layanan Kesehatan: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan, termasuk penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Program kesehatan masyarakat yang inklusif harus dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan,
- c. Kebijakan Publik yang Inklusif: Proses perumusan kebijakan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemerintah perlu mendengarkan suara masyarakat, terutama dari kelompok marginal, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. (Pamungkas & Hariri, 2022)
- d. Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia: Edukasi tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- e. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemenuhan kebutuhan warga negara dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Philip, 2016) Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Emmanuel Sujatmoko. (2010). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 94–101.
- Merentek, Y. S. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum*, 6(9), 180–187. https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IV(2), 33–37.